

Tulisan ini mengkaji peran KPU Kulon Progo dalam melakukan penjaminan hak pilih atas warga Kulon Progo pada Pemilu 2019 yang dilatarbelakangi penghilangan hak pilih yang terjadi di Pilkada 2017 atas warga yang tidak atau belum melakukan perekaman e-KTP dengan jumlah 1.452 warga.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan study kasus serta merujuk pada data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi.

Analisa dalam kajian ini menggunakan *teori institutional - isomorphism* guna mengetahui proses intitusional peran KPU Kulon Progo melakukan penjaminan hak pilih terkait denga relasi lembaga lain, dan *Dynamic Governace* digunakan sebagai analisa guna menguji peran KPU Kulon Progo dalam menjamin hak pilih bagi Pemilih non e-KTP. Dimana dari kedua konsep tersebut diperoleh temuan antara lain : *Isomorphism Coersive* dan *Isomorphism Normativ* yang melandasi peran KPU Kulon Progo dalam melaksanakan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih. Disamping itu, melalui analisa *Dynamic Governace* permasalahan DPT pada Pemilu 2019 terdapat sangkut pautnya atas pemutakhiran pemilih yang dilakukan pada Pilkada Kulon Progo 2017, PAW yang terjadi di tahun 2019 menjadi pelemah dalam upaya KPU Kulon Progo melakukan penjaminan hak pilih secara umum, dan ketidakoptimalan Sidalih dalam proses membantu penyusunan data pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir. Namun dibalik itu, atas perekrutan PPK dari anggota KPU periode 2013 -2018 dan kinerja PPK itu sendiri mampu menjadi penggerak utama dalam melakukan penjaminan hak pilih dalam meminimalisir pemilih non e-KTP.

Atas hal tersebut, kajian ini merumuskan rekomendasi atas kebijakan Sidalih dari sisi kelembagaan juga teknis agar dapat lebih meningkatkan daftar pemilih yang inklusif, akurat, dan mutakhir.

Kata kunci : Hak Pilih, Isomorphism, Dynamic Governace, daftar pemilih.

This research discusses Kulon Progo's Public Election Committee's (KPU) role in ensuring Kulon Progo's people's rights to vote in Indonesia's 2019 National Election, which was triggered by an abolition of rights to vote in 2017 National Election for those who had not updated their identification data (ID) to electronic ID (e-KTP), which counted up to 1,452 people.

This research uses descriptive-qualitative research design by using case studies approach and citations from primary and secondary data. The data was collected from field observation, in-depth interviews and documentation.

The analysis in this research uses institutional theory - isomorphism in order to find out the institutional process between Kulon Progo's KPU and other related institutions in ensuring people's rights to vote as per Kulon Progo's KPU's role and Dynamic Governance as an analytical approach to test Kulon Progo's KPU's role in ensuring the rights to vote for those who had not upgraded their ID to e-KTP. By using both concepts, the results are that coercive isomorphism and normative isomorphism are two theories which became the reason for Kulon Progo's KPU to initiate the registration and upgrade for the list of voters. Besides that, according to Dynamic Governance approach, the list of fixed voters (DPT) for Kulon Progo in Indonesia's 2019 National Election is related to the upgrade of voters list which was done for Kulon Progo's National Election in 2017, and the occurrence of in-between-time substitutes (PAW) and also Sidalih's incapacity in aiding the making of the voters list accurately debilitated Kulon Progo's KPU's attempt in ensuring its people's rights to vote. Even though this was fatal, the establishment and recruitment of Kulon Progo's Sub-District Election Committee (PPK) and its performance were vital in ensuring voters' rights and minimalizing the numbers of non-e-KTP voters.

Based on the results of the analysis, this research strongly recommends the use of Sidalih policy in institutional and technicalities aspects in order to create an inclusive, accurate and up-to-date voters list.

Keywords: Dynamic governance, isomorphism, voters list, voters' rights.